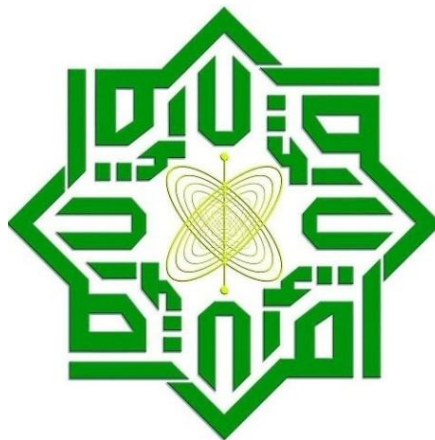


**ANALISIS PARTISIPASI MASYARKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA MERBAU KECAMATAN BUNUT
KABUPATEN PELALAWAN**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh

HERY AZMAR

NIM. 10875003278

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1434 H/2013 M**

ABSTRAK

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MERBAU KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN

Oleh: Hery Azmar

Penelitian ini dilakukan di Di Desa Merbau Kecamatan bunut Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten pelalawan serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis dimana data deskriptif jawaban responden dan di analisa oleh penulis. Yang menjadi populasi ini adalah jumlah penduduk desa yang terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan jumlah populasi sebanyak 847 orang. Untuk keperluan penelitiandi perlukan sampel berjumlah 87 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel slovin. Dari hasil penelitian lapangan dan pembahasan melalui penyebaran questioner, observasi, serta interview terhadap responden maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahw partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawanb masih dalam kategori rendah dan faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat meliputi; kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keadaan lingkungan sekitar desa merbau sehingga masyarakat lebih cenderung bersikap apatais terhadap keadaan sekitar, masyarakat yang umumnya berkerja dari pagi hingga sore hari sehingga menyebabkan mereka tidak dapat menghadiri kegiatan rapat pembangunan desa merbau dan lain-lain.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Fungsi Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Partisipasi	13
2.2 Partisipasi Masyarakat	18
2.3 Bentuk Partisipasi dalam masyarakat	20
2.4 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	23
2.5 Konsep Partisipasi Masyarakat	25
2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	25
2.7 Pembangunan.....	28
2.8 Pembangunan Desa	32
2.9 Konsep Operasional / Variabe	43
2.10 Hipotesis	44
2.11 Kerangka Berfikir	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.2. Jenis dan Sumber Data	46
3.2.1. Data Primer	46
3.2.2. Data Sekunder	46
3.3. Teknik Pengumpulan Data	47
3.4. Populasi dan Sampel	47
3.4.1. Populasi	47
3.4.2. Sampel	48
3.5. Analisa Data	50

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografi Desa Merbau	52
4.2 Pemerintahan Desa Merbau	58
4.3 Komunikasi Dalam Pembangunan Desa	60

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	61
5.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	64
5.2.1 Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	64
5.2.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan	70
5.2.3 Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat	75
5.2.4 Partisipasi dalam Evaluasi	79
5.3 Pembahasan	83
5.4 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.	85

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	87
6.2 Saran.....	88

DFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program pembangunan fisik dan non fisik yang telah dilaksanakan dari hasil swadaya masyarakat dan pemerintah daerah di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	8
Tabel 1.2 Jadwal gotong-royong Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	9
Tabel 1.3 Daftar Absen Rapat Desa Merbau.....	10
Tabel 2.1 Tahap Pelaksanaan Program Partisipasi	22
Tabel 3.1 Jumlah Populasi dalam Penelitian.....	48
Tabel 3.2 Klasifikasi Populasi dan Sampel Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Penggunaan Tanah di Desa.....	53
Tabel 4.2 Klasifikasi Jumlah Penduduk di Desa Merbau Menurut Kelompok Umur.....	54
Tabel 4.3 Klasifikasi Mata Pencarian Penduduk	55
Tabel 4.4 Sarana Pendidikan di Desa Merbau	56
Tabel 4.5 Keadaan Sarana Pendidikan Di Desa Merbau	56
Tabel 4.6 Jenis dan jumlah sarana Kesehatan Desa Merbau.....	57
Tabel 4.7 Klafikasi jumlah rumah ibadah.....	58
Tabel 4.8 Sarana Pada Kantor Desa Merbau Tahun 2012	59
Tabel 5.1 Klasifikasi Responden Menurut Mata Pencarian Penduduk.....	62
Tabel 5.2 Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin	63
Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Menurut Umur	63
Tabel 5.4 Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Dalam Rapat Pembangunan Desa	64
Ta66bel 5.5 Tanggapan Responden Mengenai Keaktifan Masyarakat Dalam Diskusi Perencanaan Pembangunan Desa.....	65

Tabel 5.6	Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Dalam Menyampaikan Ide-Ide Yang Berkaitan Dengan Pembangunan.....	66
Tabel 5.7	Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan dalam memberikan tanggapan dan saran pada usulan yang diajukan oleh peserta rapat lainnya	67
Tabel 5.8	Tabel Rekapitulai Tanggapan Responden Dari indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	68
Tabel 5.9	Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Keseluruhan Progran Pembnagunan Yang Direncanakan Oleh Desa.	70
Tabel 5.10	Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan Dana untuk Kelancaran Program pembangunan.....	71
Tabel 5.11	Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan Material (Bahan-bahan bangunan) untuk Kelancaran Program Pembangunan.	72
Tabel 5.12	Tabel Rekapitulai Tanggapan Responden Dari indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan.....	73
Tabel 5.13	Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Merasakan Manfaat Atas Pelaksanaan Program Pembangunan Yang Telah Di Tetapkan.....	75
Tabel 5.14	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Program Sesuai Dengan Target Yang Telah Ditetapkan.....	76
Tabel 5.15	Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Menggunakan Fasilitas yang Telah Dibangun Oleh Pemerintah Desa.....	77
Tabel 5.16	Tabel Rekapitulai Tanggapan Responden Dari indikator Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat.....	78
Tabel 5.17	Tanggapan Responden Mengenai Pembangunan Sudah Mencapai Hasil yang Maksimal.....	79
Tabel 5.18	Tanggapan Responden Mengenai Program Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Ditetapkan.....	80

Tabel 5.19 Tanggapan Responden Mengenai Tidak ada Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan	81
Tabel 5.20 Tabel Rekapitulai Tanggapan Responden Dari indikator Partisipasi dalam Evaluasi.....	82
Tabel 5.21 Rekapitulasi Keseluruhan Questioner.	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, memiliki arti penting yang cukup strategis karena secara keseluruhan desa merupakan basis ketahanan nasional bagi wilayah kesatuan Negara kesatuan republik Indonesia melalui keberhasilan desa dimungkinkan pemerataan pembangunan desa yang pada akhir nanti akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat, dikarenakan lebih dari 80 % rakyat Indonesia masih bermukim dilingkungan pedesaan. Kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia dapat dimulai dengan melaksanakan pembangunan desa yang baik dan terencana, dengan demikian, kita harus benar-benar memahami arti pembangunan secara mendasar guna tercapainya cita-cita bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan adalah upaya meningkatkan derajat kehidupan secara berkelanjutan untuk mampu menentukan nasib ditangannya sendiri, yaitu mencerdaskan manusia dan melepaskan mereka dari ketergantungan pada manusia lain. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk menunjang kegiatan manusia dalam pembangunan. pembangunan berlangsung dalam masyarakat yang selalu berubah, pembangunan tidak hanya menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam masyarakat yang berubah, tetapi juga berperan untuk melakukan perubahan atau mengarahkan perubahan tersebut.

Pembangunan desa mengutamakan pada prinsip perimbangan, kewajiban yang serasi antara pemerintah dan rakyat, pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bantuan serta fasilitas, sedangkan masyarakat memberikan partisipasi aktif yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan sudah tentu akan memerlukan tersedianya dana yang besar. Penyediaan dana tersebut tidak akan memadai bila mengharapkan pemerintah saja. Pemerataan masyarakat dalam menerima kembali hasil pembangunan diseluruh desa. Disamping itu peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat juga dijadikan sarana utama pembangunan.

Pada hakekatnya partisipasi masyarakat adalah sebuah keharusan dalam bentuk respon terhadap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pemerintah, baik pusat maupun daerah oleh masyarakat. Tanpa adanya respon positif dari masyarakat, maka kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah tidak dapat terlaksana dengan maksimal terlebih lagi kegiatan yang direncanakan tersebut menyangkut kegiatan dalam bentuk pembangunan.

Menurut peraturan daerah pelalawan No 25 tahun 2004 tentang pembangunan, ruang lingkup perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana pembangunan jangka panjang Daerah selama 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun, dan rencana strategis suatu kerja perangkat daerah selama 5 tahun. Pembangunan terpusat pada penduduk / masyarakat dari rakyat untuk rakyat yang terdapat pada paradigma pembangunan yaitu pembangunan bukan tujuan akhir akan tetapi pembangunan adalah adat untuk

mencapai hidup layak dan meningkatkan standar hidup. Partisipasi dalam proses pembangunan yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, dan implementasi.

Dengan ditetapkan peraturan pemerintah No. 8 tahun 2005 tentang pemerintah desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal III Ayat 9 menjelaskan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa, lembaga kemasyarakata atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mental pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 5 No. 8 tahun 2005 tentang, badan permusyawaratan desa disebut desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi keseluruhan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan dasa dengan memperhatikan sarana dan pendapatan dasa dengan memperhatikan sarana dan pendapat masyarakat, peraturan pemerintah ini juga menjelaskan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia.

Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, intensitas desa sejenis desa atau

masyarakat adat lain dan sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintah, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maksud dan tujuan UU tersebut menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri.

Konsekuensi implementasi otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa, terdapat dalam pasal 206 Bab III dimana disebutkan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
 Pemerintahan desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dimaksudkan yaitu ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemerintahan desa yang memang telah ada sejak desa tersebut dibentuk, seperti pelaksanaan peraturan-peraturan desa yang menyangkut tradisi adat istiadat desa setempat.
2. Urusan pemerintah yang berdasarkan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Desa diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan tetap terkoordinasi melalui pelimpahan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota.

3. Tugas pemantauan dari pemerintah, pemerintah Propinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota

Yaitu tugas-tugas yang bersifat pemantauan baik perkembangan penduduk, dan lain sebagainya, dengan demikian desa adalah penyelenggara pemerintahan terendah didalam susunan pemerintahan.

4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa memiliki hak dan wewenang dalam membuat dan menetapkan peraturan desa yang disusun dan dibahas bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang diharapkan dengan ditetapkannya peraturan desa tersebut dapat memenuhi keinginan masyarakat desa.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 yaitu pasal 208 yang berbunyi: “Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah” peraturan pemerintah tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa yaitu pasal 8 yang isinya “Urusan Pemerintah pengaturannya yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagai mana dalam pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bila mana pemerintah desa Kepala Desa sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kepakuman.

Ditinjau dari etimologis, bahwa kata partisipasi adalah merupakan padanan dari kata participatie Bahasa Belanda, atau participation Bahasa Inggris yaitu bagian atau ikut serta. Sedangkan menurut Seligman dan Edwin dalam Muhammad Al Amin 2003:9 Mengatakan Bahwa pengertian partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar”.

Dari rumusan diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi itu selalu dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala kehidupan masyarakat ataupun kelompok masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat merupakan suatu elemen atau proses pembangunan oleh karena itu partisipasi masyarakat perlu dibangkitkan, tanpa adanya partisipasi masyarakat otomatis pembangunan tidak akan terlaksana.

Masyarakat dan Pemerintah Desa, yang dimaksud adalah Pemerintah, dan Masyarakat Desa Merbau kecamatan Bunut kabupaten Pelalawan, dimana terdapat indikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana program-program pembangunand Desa yang telah disusun oleh

pemerintah desa belum dapat terlaksana dengan maksimal diduga dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun desa.

Adapun beberapa program pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan dari swadaya masyarakat dan pemerintah daerah di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1 Program pembangunan fisik dan non fisik yang telah dilaksanakan dari hasil swadaya masyarakat dan pemerintah daerah di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

No.	Kegiatan	Jenis Kegiatan	Sumber Daya Pembangunan	Rencana Program Pembangunan
1.	Fisik	a. Pengadaan PLTD	a. Swadaya masyarakat pemkab Kab. Pelalawan	a. Pembuatan Gorong-gorong
		b. Pembutan Jembatan	b. Pemkab Kab. Pelalawan	b. Pembangunan Poskamling
		c. Pembangunan Mesjid Nurul Huda Desa Merbau	c. Swadaya Masyarakat	c. Pembangunan Gapura (Gerbang Desa)
2.	Non Fisik	a. Keagamaan/Wirit yasin	a. Swadaya Masyarakat	
		b. Pendidikan/Belajar tambahan	b. Swadaya Masyarakat	
		c. Kesehatan/Berobat Gratis	c. Pemkab Kab. Pelalawan	

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Merbau 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembangun fisik dan non fisik yang dilaksanakan di Desa Merbau cukup pesat hal ini dilihat bahwa tingkat penggerak pembangunan berawal dari ide-ide masyarakat dan dibantu oleh pemerintah daerah demi terlaksannya proses pembangunan dan pelaksanaan pengawasan

dilapangan, serta mampu melakukan kerja sama yang baik dalam masyarakat hanya saja kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Merbau Kabupaten Bunut Kabupaten Pelalawan adalah rendahnya kehadiran masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan program pembangunan Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilihat dari tingkat daftar kehadiran masyarakat dalam melaksanakan gotong royong sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jadwal gotong-royong Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No	Bulan	Jadwal Gotong Royong	Jumlah Masyarakat yang melaksanakan gotong royong	Jumlah masyarakat yang di undang
1.	Januari	05/11	20 Orang	60 Orang
2.	Februari	20/11	24 Orang	60 Orang
3.	Maret	19/11	22 Orang	60 Orang
4.	April	25/11	25 Orang	60 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Merbau 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 60 orang yang diundang untuk ikut bergotong royong, rata-rata hanya 20 sampai dengan 25 orang saja yang hadir atau hanya sekitar 33% sampai 42% saja yang hadir. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Selain rendahnya tingkat kehadiran masyarakat untuk mengikuti kegiatan gotong-royong,

Selanjutnya dari pengamatan awal peneliti di Desa Merbau Kecamatan Bunut terlihat beberapa gejala yang mendukung untuk diadakannya suatu penelitian yaitu dari informasi yang peneliti dapatkan dari lima orang masyarakat

Desa Merbau pendapatan antara lain, menurut Bapak Aprizalmo 41 Tahun yang bekerja sebagai penjual ikan beliau tidak sempat bergotong royong karena pagi harinya beliau pergi menjemput ikan kepada penjual ikan di beberapa desa yang berada di daerah perairan seperti diransang, sai'ara, untuk dijual kembali kepada pembeli masyarakat Desa Merbau. Selanjutnya menurut Bapak Annuwar 32 Tahun beliau juga tidak bisa bergotong royong karena beliau harus menyadap karet seharian. Seterusnya menurut Bapak Abu Kasim 45 Tahun beliau tidak bisa mengikuti gotong royong karena dia mengajar seharian, dan menurut Bapak Daman 80 Tahun lebih memilih bekerja untuk kepentingan pribadi dari pada gotong-royong, kemudian menurut Bapak Zainur 48 Tahun lebih baik bekerja dari pada mengikuti bergotong royong.

Indikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga dapat kita lihat pada kegiatan rapat bulanan, dimana dari data absen rapat tersebut terlihat tingkat kehadiran masyarakat masih tergolong rendah hal ini dapat dilihat dari absen kehadiran rapat untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.3 Daftar Absen Rapat Desa Merbau

No.	Bulan	Jadwal Rapat	Jumlah Masyarakat yang hadir	Jumlah masyarakat yang diundang
1.	Januari Januari	01/11 15/11	17 Orang 16 Orang	60 Orang
2.	Februari Februari	05/11 20/08	14 Orang 15 Orang	60 Orang
3.	Maret Maret	10/11 18/11	13 Orang 17 Orang	60 Orang
4.	April April	09/11 22/11	18 Orang 15 Orang	60 Orang
5.	Mei Mei	11/11 26/11	17 Orang 14 Orang	60 Orang

Rata-rata masyarakat yang hadir	16 Orang	60 Orang
--	-----------------	-----------------

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Merbau 2011

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kehadiran masyarakat untuk ikut serta dalam rapat sangat rendah terlihat dari bulan Januari hingga bulan Mei rata-rata hanya 16 orang saja yang hadir dari 60 orang masyarakat yang di undang. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh Desa masih tergolong rendah, dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga rendah.

Dari berbagai gejala-gejala di atas maka permasalahan tentang partisipasi masyarakat di desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama partisipasi masyarakat melakukan gotong royong.
2. Selain kurangnya partisipasi dari segi tenaga, partisipasi dalam memberikan pemikiran-pemikiran untuk pembangunan desa juga masih kurang.
3. Permasalahan yang lain waktu rapat desa, dilihat dari absen rapat, terlihat masih enggan menghadiri rapat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?

2. Apa saja hambatan-hambatan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Masukan dan sumbangan pikiran terhadap pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Merbau Kecamatan Bunut
2. Bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub, seperti berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang mana dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : KERANGKA TEORI

Menguraikan tinjauan pustaka, mengenai pembangunan, pembangunan desa, prinsip-prinsip partisipasi, swadaya masyarakat, penduduk yang merupakan teori-teori pendukung penulisan ini nantinya, yang merupakan deskripsi teori pada bab ini, selain itu, dalam bab ini juga berisi, kerangka berpikir hipotesis, konsep operasional atau variabel.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang tempat dan waktu penulisan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknis pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Geografi Desa Merbau, Demografi, Pemerintahan Desa Merbau

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil penelitian pembahasan yang harus dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Partisipasi

Menurut Windardi dalam Wiguna (2000) partisipasi adalah ikut serta seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut.

Seperti dimaklumi dalam kegiatan atau aktivitasnya tujuan masyarakat yang mulia, baru akan tercapai apabila ada partisipasi anggotanya, sebab didalam partisipasi terdiri atas:

1. Partisipasi dapat melaksanakan dan dapat pula suka rela
2. Partisipasi dapat formal dan informal
3. Partisipasi bisa bersifat langsung dan bisa bersifat tidak langsung

Dalam kamus bahasa Indonesia , partisipasi dapat diartikan sebagai hal keikut sertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Kata partisipasi mengandung pengertian aktif, artinya adanya sesuatu yang lebih baik

Partisipasi menurut Miriam Budiardjo (2004:185) adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga seseorang atau sekelompok orang yang aktif tersebut merupakan faktor terpenting dari semua kegiatan politik dalam menentukan pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh sendirinya. (Taliziduhu Ndraha, 2000 : 18)

Usaha-usaha tersebut adalah seperti dibawah ini :

- a. Proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
- b. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.
- c. Partisipasi itu memberikan mamfa'at langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- d. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dilihat dari pengamatan diatas bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat haruslah diberikan informasi tentang arti penting pembangunan melalui kegiatan komunikasi, adaptasi, kerja sama sehigga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat memahami dan pada hakekatnya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif artinya mempunyai daya dorong atau mempunyai sifat negatif artinya mempunyai daya penghambat. Faktor-faktor yang menjadi daya penghambat agar masyarakat ikut berpartisipasi adalah :

1. Faktor Ekonomi

Lapisan masyarakat setempat lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya sebagian besar masyarakat memiliki mata pencarian bertani, dengan bertani mereka merasa kebutuhan masih belum mencukupi sehingga masyarakat menilai bahwa pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.

2. Pendidikan yang relatif rendah

Dengan adanya tingkat pendidikan yang relatif rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu sehingga, seseorang kurang memahami permasalahan yang dihadapi.

3. Terdapatnya kecendrungan kaum elit komunitas atas saja yang mampu dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

4. Dewasa ini pembangunan masyarakat lebih berbaur politik artinya pembangunan masyarakat dijadikan alat komunikasi politik atau simbol politik.

Dari pengamatan diatas dapat dilihat bahwa untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.

Antara partisipasi masyarakat Desa dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara sendiri, terdapatnya kesedian masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara sendiri pula. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat mempunyai kemampuan berkebang secara mandiri dan bisa pula membangun dengan partisipasi vartikal baik keatas maupun kebawah.

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, menurut T. Ndraha partisipasi publik dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses pembentukan keputusan;
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;
- d. Partisipasi dalam evaluasi.

Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika mereka mendapatkan manfaat dan merasa

memiliki terhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan.

1.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Vlderma menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah melahirkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat kepada orang lain duduk dalam pemerintahan. Seangkan hak poliyik, sebagai hak asasi tetap melekat setiap individu yang bersangkutan.
2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan

sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat luas.

3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna
4. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental.
5. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
6. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokrasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatkannya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa. (Siti Irene : 2011:54).

Faktor yang dapat menghambat atau mencadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat antara lain:

1. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.

2. Aspek-aspek tipologi (Pembuktian dan jurang)
3. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
4. Demografis (Jumlah penduduk)
5. Ekonomi (Desa miskin/tertinggal)

1.3 Bentuk Partisipasi dalam masyarakat

Cohen dan Uphoff memberikan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program, saat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya

pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen & Hoff, meliputi; *pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Partisipasi dalam partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Tabel 2.1 Tahap Pelaksanaan Program Partisipasi

Tahap	Deskripsi
1. Pengambilan keputusan	Penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Pelaksanaan	Penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan
3. Pengambilan manfaat	Partisipasi berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa di capat.
4. Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Cohen dan Uphoff menyatakan bahwa ilmuwan dan politikus lebih memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi. Sementara para administrator cenderung memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam rangka memperbaiki *wellbeing* masyarakat. Hal tersebut memperhatikan adanya latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda akan menimbulkan konsep partisipasi yang berbeda pula.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Yoni Yulianti 2012:8) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap

penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Ketiga tahapan di atas merupakan tahapan pokok yang harus dijalankan dalam pembangunan desa dengan peran serta masyarakat. Ketiga tahapan di atas juga dapat dijadikan acuan dalam melihat tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

1.4 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mendorong masyarakat untuk mandiri serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan memperbaiki hidup sendiri. Keterlibatannya, dapat berupa aktifitas

dalam wujud sumbangan pikiran, pendapat maupun tindakan, dapat pula berupa sumbangan biaya, material untuk perbaikan lingkungannya. (Alit, 2005). Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 5 tahap kegiatan, yaitu kegiatan dalam pengambilan inisiatif, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pengelolaan dan pemeliharaan.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) (Chamber, dalam Kartasasmita, 2007). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat (Subejo dan Supriyanto, 2004). Sedangkan menurut Hogan (2000:20) dalam Adi (2008:85) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama antara lain: Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan yang tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*); Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discus reasons for depowerment/empowerment*), Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*), Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan. (*identify useful power bases*), Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya. (*develop and implement action plans*).

1.5 Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Arnstein dalam (Suriyanto 2007:47) menjelaskan partisipasi sebagai arti di mana warga negara dapat mempengaruhi perubahan sosial penting, yang dapat membuat mereka berbagi manfaat dari masyarakat atas. Dia mencirikan delapan anak tangga yang meliputi: manipulasi, terapi, memberi tahu, konsultasi, penentrangan, kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan control warga negara.

1.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan Zanden (1988), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi

masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet,1994:97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 2004:137-143).

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. *Pengetahuan dan keahlian.* Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2. *Pekerjaan masyarakat.* Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan

sedikitpunwak tunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;

3. *Tingkat pendidikan dan buta huruf.* Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. *Jenis kelamin.* Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
5. *Kepercayaan terhadap budaya tertentu.* Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

b. Faktor-faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal Tata Loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

1.7 Pembangunan

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “Bangun” yang artinya bangkit, sedangkan pembangunan diartikan sebagai proses, pembuatan, atau berdiri. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi :

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
2. Ia mencakup keadilan (*equity*) perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mempengaruhi kapasitasnya.

3. Penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima mamfa'at pembangunan.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) administrasi pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup :

1. Pembangunan dibidang politik
2. Pembangunan dibidang ekonomi
3. Pembangunan dibidang sosial budaya
4. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan

Semenjak ada dua orang dimuka bumi ini, usaha hidup bersama telah dilakukan. Usaha hidup bersama sejak dahulu diakui sebagai suatu keharusan karena disamping sifat manusia sebagai makhluk sosial karena dalam upaya mencapai tujuannya manusia memerlukan bantuan orang lain (Sondang P Siagian, 2000 : 131).

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemauan optimal manusia baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan.
3. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kepercayaan ini

dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara sendiri.
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan yang lainnya dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati.

Soedjadmoko menjelaskan persoalan pembangunan cenderung pada proses pembangun ekonomi, ia mengatakan proses pembangunan ekonomi adalah proses sosial yang discontinue dan elektis yang hanya dapat dipahami secara dinamis. Jadi secara mendasar yang menjadi daya penggerak utama pembangunan adalah tekad suatu bangsa untuk maju dan membangun.

Tekad suatu bangsa memerlukan dua unsur yang dinamis untuk menjamin efektivitas kelangsungan pembangunan, yang tegas, yang pertama adalah bayangan hari depan, suatu growth perspektif dapat memberikan arah kepada kekuatan-kekuatan dinamis didalam masyarakat. Kedua kemampuan organisasi mengorganisasikan diri guna keperluan pembangunan.

Sementara Menurut Roger dalam (Zulkarimen Nasution 2002:82) pembangunan merupakan sebagai proses yang terjadi pada level atau pembangunan merupakan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan pada modernisasi menunjukkan pada proses yang terjadi pada level individu.

Dari uraian diatas bahwa pembangunan itu akan terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi serta pembangunan itu hanya bisa terjadi masyarakat atau kalangan tertentu saja.

Selanjutnya Menurut (Sofian Hamin 2003:56) ialah sebagai suatu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi yang lebih baik. Sesuai pula dengan pengertian yang diberikan oleh Nurman dalam siasat Jurnal Ilmu Politik Vol 12, 2003, menurutnya pembangunan adalah suatu yang dilakukan secara sadar, berkelanjutan dari suatu kondisi-kondisi yang lebih baik.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang suatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat akhir.

Dalam hubungan masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai dari yang khas dengan cita-cita, harapan, keinginan dan kebutuhan yang berbeda, perbedaan tersebut harus diterima dan diakui sebagai kenyataan. Mengakui dan menerima kenyataan secara implisit juga berarti manusia merupakan makhluk yang dinamis. Salah satu implisit dari dinamika itu adalah bahwa makin maju seseorang dan suatu masyarakat maka kebutuhan pada gilirannya menjadikan upaya pencapaian semakin sulit. (Sondang P Siagian 2000:132)

Defenisi tersebut secara implisit menunjukan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan pembangunan nasional. Artinya menyelenggarakan

kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dengan segala aparat dan seluruh jajaran meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah desa cukup dominan.

Maksudnya adalah bahwa manusia merupakan objek pembangunan dan subjek pembangunan, karena manusia sebagai subjek pembangunan maka dia harus diperhitungkan, oleh karena itu merupakan objek pembangunan dan subjek pembangunan, karena manusia sebagai subjek pembangunan maka dia harus diperhitungkan, oleh karena itu perlu mengajak subjek tadi berpartisipasi dalam pembangunan. Kita sering mendengar bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak mendapat sambutan dari masyarakat.

1.8 Pembangunan Desa

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola

sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat.

Prinsip luas, nyata dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat

untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Hal ini lebih ditegaskan dalam pengaturan mengenai desa yaitu dengan ditetapkannya PP No 72 tahun 2005. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu : Keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat.

Ginanjari Kartasasmita (1994) memberikan pengertian pembangunan yang sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan dalam Paradigma Governance bertujuan untuk mewujudkan Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka terwujudlah Good Governance.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Selanjutnya khusus untuk anggaran pembangunan yang bersumber dari Alokasi dana desa, 70% dari anggaran tersebut merupakan belanja pemberdayaan masyarakat. Ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Permendagri No 37 tahun 2007 jo. Pasal 21 ayat (4) Perbup No 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :

1. Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik ;
2. Menunjang kegiatan LPMD dan PKK;
3. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
4. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
5. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
6. Teknologi Tepat Guna;
7. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
8. Pengembangan sosial budaya; dan/atau
9. Kegiatan lainnya yang dianggap penting

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

1. Pengembangan masyarakat

2. Pengorganisasian masyarakat

Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan ditempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding.

Dapat juga dengan menyediakan buku-buku bacaan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan atau peminatan masyarakat. Masih banyak bentuk lainnya yang bias diupayakan. Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan atau menghambat peningkatan kesejahteraan hidup. Merubah sikap bukan pekerjaan mudah. Mengapa karena masyarakat sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah melakukan hal itu. Untuk itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan sikap. Caranya adalah dengan memberikan penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merugikan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan banyak informasi dengan menggunakan berbagai media, seperti buku-buku bacaan, mengajak untuk melihat tempat lain, menyetel film penerangan, dan masih banya cara lain.

Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan mungkin pendamping sebagai pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan bahkan memberikan contoh langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya pendamping harus mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada saat pendamping meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah mampu untuk melakukannya sendiri atau mandiri. Prinsip dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri:

a. Penyadaran

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangunkan dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangunkan dari “tidur” keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan. Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali

sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang. Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya.

b. Pelatihan

Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka.

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa pengetahuan menganggarkan kekuatan.

c. Pengorganisasian

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir. Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada

kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan. Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

d. Pengembangan kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada penyadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata “kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan”.

e. Membangun Dinamika

Dinamika masyarakat berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut.

Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran. Pendamping dalam pemberdayaan masyarakat antara lain kabupaten, Fasilitator Kecamatan, Asisten Fasilitator Kecamatan, Fasilitator

Desa, Camat, atau nama pendamping lainnya. Pada dasarnya siapa saja yang berperan mendampingi masyarakat dikategorikan sebagai pendamping. Secara garis besar pendamping masyarakat memiliki 3 peran yaitu: pembimbing, enabler, dan ahli.

Sebagai pembimbing, pendamping memiliki tugas utama yaitu membantu masyarakat untuk memutuskan/menetapkan tindakan. Disini pendamping perlu memberikan banyak informasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menetapkan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Sebagai enabler, dengan kemampuan fasilitasnya pendamping mendorong masyarakat untuk mengenali masalah atau kebutuhannya berikut potensinya. Mendorong masyarakat untuk mengenali kondisinya, menjadi begitu penting karena hal ini adalah langkah awal untuk memulai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat. Ketrampilan fasilitasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan peran ini.

Sebagai ahli, pendamping dengan ketrampilan khusus yang diperoleh dari lingkup pendidikannya atau dari pengalamannya dapat memberikan keterangan-keterangan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat saat mereka melaksanakan kegiatannya.

Keterangan-keterangan yang diberikan oleh pendamping bukan bersifat mendikte masyarakat melainkan berupa penyampaian fakta-fakta saja. Biarkan masyarakat yang memutuskan tindakan yang akan diambil. Untuk itu pendamping

perlu memberikan banyak fakta atau contoh-contoh agar masyarakat lebih mudah untuk mengambil sikap atau keputusan dengan benar.

Pendamping dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat perlu menyadari, bahwa peran utamanya melakukan pembelajaran kepada masyarakat. Berdasarkan peran pendamping sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi persyaratan pendamping adalah sebagai berikut :

1. Mampu membangun kepercayaan bersama masyarakat.
2. Mampu mengenali potensi masyarakat
3. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat.
4. Profesional dalam pendekatan kepada masy.
5. Memahami kondisi masyarakat.
6. Punya ketrampilan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masy.
7. Mengetahui keterbatasan diri sehingga tahu:
 - Kapan meminta nasehat
 - Dimana mendapatkan nasehat tenaga ahli
 - Siapa yang harus didekati
 - Ruang lingkup tugas dari berbagai dinas
 - Sumber-sumber bantuan tambahan.

2.9 Konsep Operasional / Variabel

Untuk memudahkan dan memahami serta menyamakan persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, perlu dijelaskan dan dijabarkan konsep operasional sebagai berikut:

1. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang baik secara mental, emosional serta fisik dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan.
2. Partisipasi Masyarakat desa adalah keterlibatan masyarakat desa merbau dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat dalam upaya pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik.
3. Pembangunan desa adalah sebagai suatu usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah kondisi desa yang lebih baik dimana dalam penelitian ini adalah desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa tersebut.

Indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan.

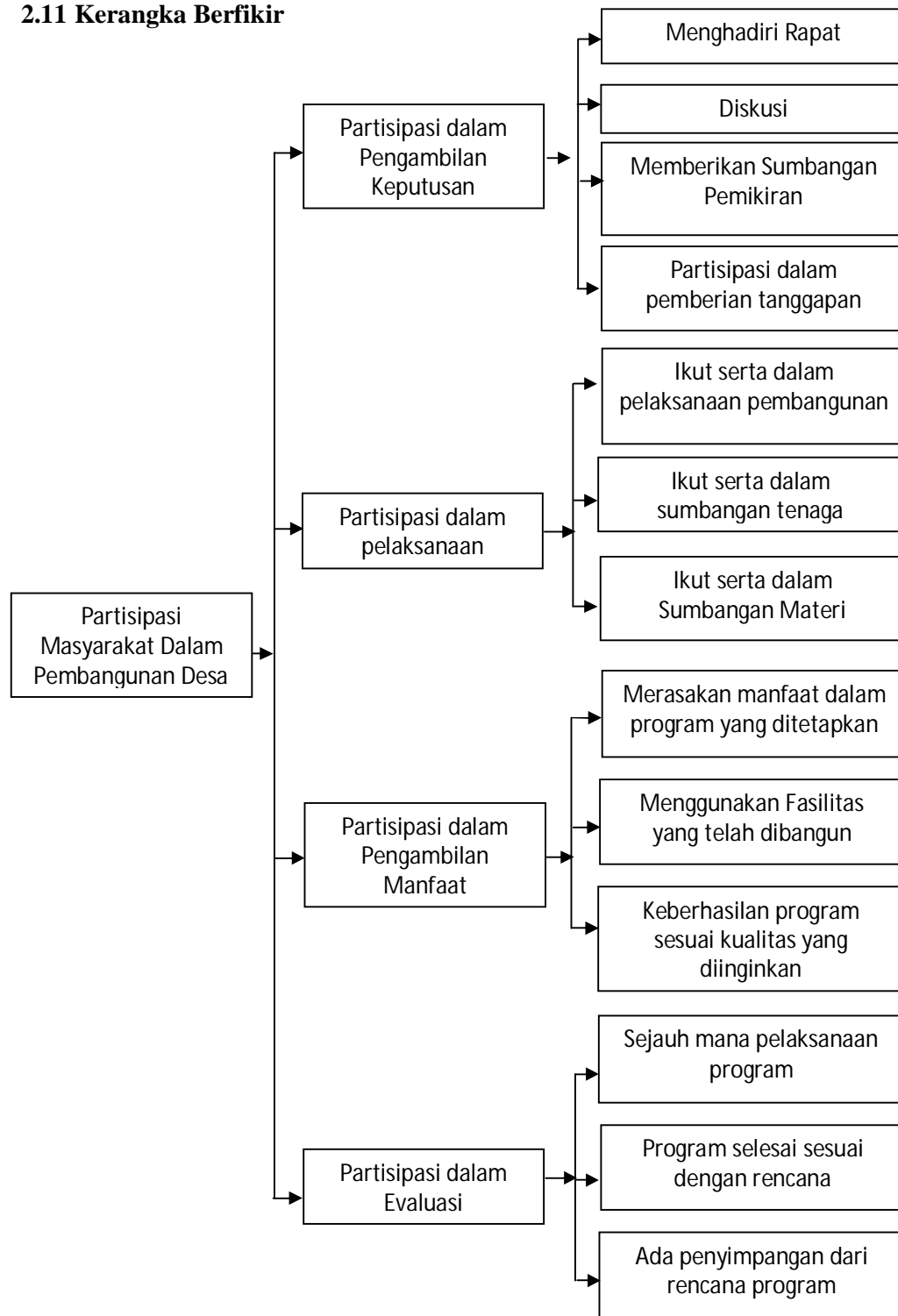
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, dengan menjalankan semua program yang telah disusun pada tahap perencanaan.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Partisipasi dalam partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

2.10 Hipotesis

Hipotesis adalah dalil atau prinsip yang logis dan diterima secara rasional tanpa mempercayai sebagai kebenaran sebelum diuji kebenarannya. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, perumusan masalah, dalam kerangka teori maka dapat ditarik hipotesis berupa kesimpulan sementara yaitu: *“diduga partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan masih rendah.*

2.11 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan pada tahun 2011.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui responden penelitian yang merupakan sumber informasi utama memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan penelitian. Jenis data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang meliputi:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mamfa'atkan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

3.2.2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa yang telah dibukukan, data itu meliputi:

1. Data keadaan geografis,
2. Data jumlah penduduk,
3. Data struktur pemerintahan desa,
4. Data mata pencarian penduduk,

5. Dan data sekunder lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian, pada kantor Kepala Desa Merbau.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Quesioner (Angket)

Yaitu dengan membuat dan mengajukan daftar pertanyaan kepada reponden penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan mengadakan Tanya Jawab kepada key informance (sumber informasi) yang dijadikan sebagai sumber guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini

3. Pengamatan Langsung (*Observation*)

Pantauan yang dilaksanakan langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Adat, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa Merbau yang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun

Merbau, Dusun Pematang Balam, Dusun Unjung Banjar. Untuk melihat klasifikasi dari populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Populasi dalam Penelitian

No	Populasi Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Tokoh Adat	4
4	Perangkat Desa	5
5	Masyarakat Desa Merbau :	
	a. Masyarakat Dusun Merbau	383 Orang
	b. Masyarakat Dusun Pematang Balam	271 Orang
	c. Masyarakat Dusun Unjung Banjar	182 Orang
Jumlah Populasi		847

Sumber : Data olahan tahun 2012

Dari data di atas dapat dilihat bahwa populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 847 orang.

3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Oleh karena jumlah populasi untuk kepala desa, dan pemuka masyarakat tidak terlalu banyak yang dimiliki oleh populasi. Oleh karena jumlah populasi untuk kepala desa, dan pemuka masyarakat tidak terlalu besar maka penulis menggunakan metode sensus. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul lebih akurat.

Pengambilan sampel dari populasi digunakan slovin sampel dimana dalam menentukan sampel ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Dimana :

n = Sampel

N = Populasi

e^2 = Tingkat Kesalahan (0,1) / 10% dari jumlah populasi.

dengan demikian sampel yang diambil dari populasi di atas adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{847}{1 + 847 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{847}{1 + (847 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{847}{9,74}$$

$n = 86,96$ jadi di genapkan menjadi 87 orang.

jadi sampel yang di ambil dari populasi yang ada adalah sebanyak 87 orang.

Dari rumus slovin sampel di atas dapat kita ketahui bahwa sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebesar 87 orang dari 847 jumlah populasi masyarakat dan dari Aparatur Desa.

Tabel 3.2 Klasifikasi Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Masyarakat dan Aparat Desa	847	87	100
	Jumlah Sampel Keseluruhan		87	100 %

Sumber: Data Olahan Tahun 2012

Dengan demikian, setelah jumlah populasi di olah menggunakan rumus *slovin*, maka ditetapkanlah jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 87 orang.

3.5. Analisa Data

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk Tabel dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Ferkuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan tingkat partisipasi masyarakat desa merbau terhadap pembangunan dari keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut:

Tinggi/sesuai	: 76-100 %
Cukup sesuai/kurang	: 51-75 %
Tidak sesuai/rendah	: 25-50 %
Sangat Tidak Sesuai/Sangat Rendah	: 0-25 %

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografi Desa Merbau

1. Luas dan Batas Wilayah Desa Merbau

Desa Merbau adalah Desa yang terletak disalah satu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, dengan luas 475 km/segi yang meliputi, wilayah daratan dan rawa.

Adapun batas-batas Desa Merbau dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebalah utara berbatasan dengan Desa Ransang dan Desa Sungai ara.(Kecamatan Pelalawan)
2. Sebalah selatan berbatasan dengan Desa Keriung, Desa Lubuk Mandian Gajah,Desa Lubuk Keranji timur,(kec Bandar petalangan)
3. Sebalah barat berbatasan dengan Desa Petani
4. Sebalah timur berbatasan dengan Desa pangkalan Panduk (kec kerumutan)

2. Jarak Desa

- a. Jarak Desa Kecamatan Bunut = 12 km
- b. Jarak Desa Ke Kabupaten = 85 km
- c. Jarak Desa Ke Provinsi = 145 km

3. Penggunaan Tanah

Keadaan tanah Desa Merbau pada umumnya merupakan tanah dataran rendah dan sebagian kecil berdataran tinggi, kondisi ini sangat cocok untuk semua tanaman palawija seperti kacang panjang, cabe, terong, kacang bogor, jagung dan

lain sebagainya yang telah memberikan hasil yang memuaskan bagi petani. Disamping itu lahan digunakan untuk perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit yang sangat menguntungkan sekali, bahkan di Desa ini sebagian besar penduduk pendapat dari hasil karet dan kelapa sawit.

Untuk lebih jelasnya tentang luas dan penggunaannya di Desa Merbau dapat dilihat Tabel 4. 1 dibawah ini.

Table 4.1 Penggunaan Tanah di Desa Merbau

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Pemukiman	298 Ha	6,68 %
2.	Sawah	10 Ha.	0,22 %
3.	Perkebunan	1430 Ha.	32,07 %
4.	Lahan Tidur	750 Ha	16,82
5.	Wilayah Hutan	1970 Ha	44,19 %
Jumlah		4458 ha	100 %

Sumber data : *Kantor Kepala Desa Merbau 2011*

Dari table diatas, dapat diketahui tanah permukiman 298 ha (6,8 %), tanah sawah 10 ha (0,22 %), tanah perkebunan 1430 ha (63,9 %), tanah lahan tidur 750 ha (16,82%), dan tanah wilayah hutan 1970 ha (44,19 %).

4. Keadaan Iklim

Iklim di Desa Merbau pada umumnya beriklim tropis, karena letaknya pada lintang khatulistiwa dan dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan yaitu bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, sedangkan bulan lainnya musim penghujan, Desa Merbau terletak 20 meter dari permukaan laut, sehingga Desa ini terlepas dari bahaya banjir.

5. Keadaan Penduduk

Berdasarkan angka lahir tahun 2011 jumlah Desa Merbau adalah 836 jiwa dari 234 KK. Desa Merbau Merupakan Desa yang cukup lama berdiri di Kecamatan Bunut, dimana penduduk yang mendiami Desa ini masih bersifat homogen dimana masyarakat masih menggunakan adat-adat suku. Karena daerahnya sangat luas, sedangkan penduduknya ± 836 maka kepadatan penduduk dalam ukuran standar.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Klasifikasi Jumlah Penduduk di Desa Merbau Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0 – 6 Tahun	123 Orang
2.	7 – 12 Tahun	91 Orang
3.	13 – 18 Tahun	80 Orang
4.	19 – 24 Tahun	89 Orang
5.	25 – 55 Tahun	406 Orang
6.	56 – 79 Tahun	40 Orang
7.	80 Tahun	9 Orang
Jumlah		836

Sumber Data : *Kantor Kepala Desa Merbau 2011*

Dari Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Merbau pada usia 56 – 79 yang merupakan usia yang produktif bagi manusia untuk melakukan berbagai aktifitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

6. Penduduk Menurut Jenis Agama

Masyarakat di Desa Merbau seluruhnya memeluk Agama Islam, untuk menjalankan pribadatan telah dibangun mesjid dan mussholah agar lebih

meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, serta keberadaan sarana ibadah tersebut tentunya sebagai jembatan menciptakan ukhwa islamiyah seperti diadakannya, “Wirid” pengajiaan setiap mesjid dan musholloh dan disamping itu juga telah dibentuk remaja mesjid dan mushollah.

7. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk berdasarkan KK

Penduduk menurut jenis mata pencaharian di Desa Merbau dapat dilihat pada dari Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3 Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	87
2.	Perternakan	34
3.	Guru	64
4.	Pegawai Negeri Sipil	79
5.	Pegawai Swasta	76
6.	TNI	23
7.	Pedagang	58
8.	Bidan	17
9.	Mentri Kesehatan	4
10.	Industri	8
11.	POLRI	44
12.	Tidak Bekerja	342
Jumlah		836

Sumber Data : *Kantor Kepala Desa Merbau 2011*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Merbau sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebenarnya Desa Merbau ini merupakan Daerah yang sangat potensial, karena memiliki tanah yang sangat subur untuk pertanian perkebunan. Dan jika diolah secara intensif dapat menambah penghasilan masyarakat baik dengan berladang dengan berkebun.

8. Tingkat Pendidikan

tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini ;

Tabel 4.4 Sarana Pendidikan di Desa Merbau

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Parsentase (%)
1.	Belum Sekolah	152	18,18
2.	Tidak Sekolah	54	6,45
3.	Tidak Tamat SD	135	16,14
4.	Tamat SD	63	7,53
5.	Tamat SLTP	257	30,74
6.	Tamat SLTA	143	17,10
7.	Perguruan Tinggi	32	3,82
Jumlah		836	100 %

Sumber Data : *Kantor Kepala Desa Merbau 2011*

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebesar 18,18% dari jumlah penduduk Desa Merbau yang belum pernah sekolah, sedangkan mayoritas penduduk yang pernah sekolah adalah tamat SD sebesar 7,53% dari jumlah penduduk, dan tamat SLTP sebesar 30,74% dari jumlah penduduk.

Selanjutnya, mengenai sarana pendidikan yang ada di Desa Merbau dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5 Keadaan Sarana Pendidikan Di Desa Merbau

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SD	1	-
	Jumlah	1	-

Sumber Data : *Kantor Kepala Desa Merbau 2011*

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sarana pendidikan tertinggi yang ada di Desa Merbau hanyalah sampai tingkat SD, dan jumlah pendidikan yang ada

tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Desa Merbau.

9. Sarana Kesehatan

Untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan di Desa Merbau belum memadai karena di Desa tersebut belum tersedia puskesmas meskipun, puskesmas belum ada prasarana dan sarana untuk bidang kesehatan berfungsi dengan baik. Sarana kesehatan yang ada di Desa Merbau dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6 Jenis dan jumlah sarana Kesehatan Desa Merbau

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1.	Bidan Desa	1	-
2.	Posyandu	1	-
	Jumlah	2	-

Sumber data : Kantor Kepala Desa Merbau 2011

Dari tabel diatas, dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Desa Merbau hanya ada bidan desa dan posyandu. Hal ini belum memadai masyarakat dibidang kesehatan, hal ini dapat diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Merbau untuk menambah sarana kesehatan seperti puskesmas.

10. Rumah Ibadah

Sebagai mana telah penulis kemukakan pada halaman terdahulu, bahwa keseluruhan dari jumlah penduduk desa merbau adalah menganut agama Islam, mengenai rumah ibadah yang ada di Desa Merbau dapat dilihat tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7 Klafikasi jumlah rumah ibadah

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah	Keterangan
1.	Mesjid	1	-
2.	Mushollah	2	-
	Jumlah	3	-

Sumber Data Kantor Kepala Desa Merbau 2011

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah rumah ibadah yang paling banyak terdapat di desa Merbau adalah mushollah. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk atau masyarakat desa Merbau menganut Agama Islam.

4.2 Pemerintahan Desa Merbau

1. Pembagian Wilayah

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintah di Desa Merbau daerah dibagi dusun yaitu dusun Pematang Balam dan dusun Ujung Banjar. Desa Merbau dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat melalui PILKADES dan dilantik oleh Bupati Pelalawan, Kepala Desa memiliki perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

2. Sarana Kantor Kepala Desa Merbau

Bagi Desa Merbau akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif jika didukung dengan sarana yang mencukupi. Tanpa sarana yang memadai maka kegiatan tata usaha Desa meliputi pencatatan, dan pemanfaatan data sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan tidak akan berjalan dengan baik.

Mengetahui hal diatas, Desa Merbau Melengkapi sarana tata usaha desanya dapat dilihat pada Tabel 4 .8:

Tabel 4.8 Sarana Pada Kantor Desa Merbau Tahun 2012

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi
1.	Meja	4	Baik
2.	Mesin Tik	2	Baik
3.	Kursi	4	Baik
4.	Lemari	2	Baik
5.	Filing Kabinet	3	Baik
6.	Kendaraan Roda Dua	1	Baik

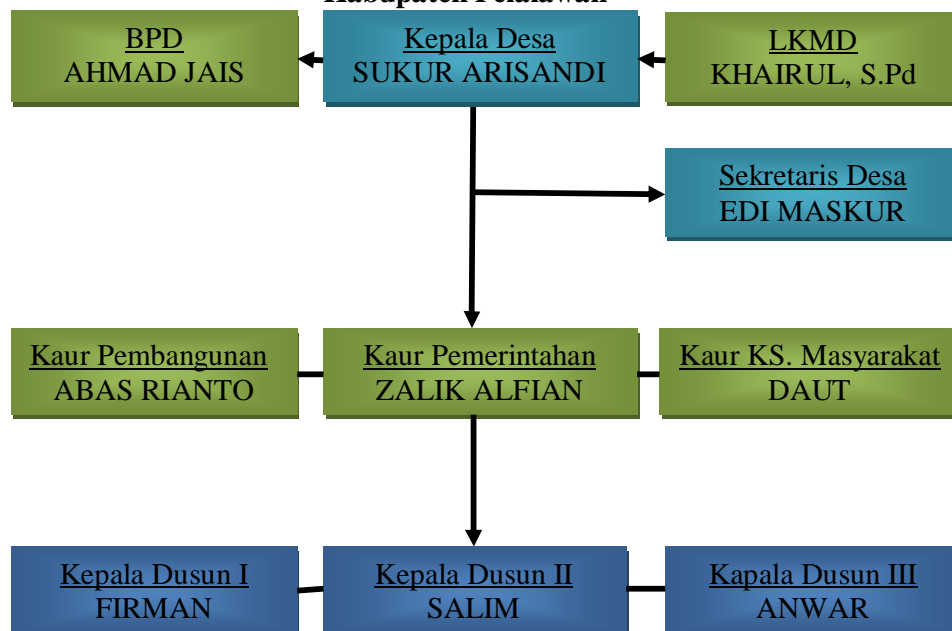
Sumber Data : *Kantor Kepala Desa Merbau 2012*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa saran pada kantor Kepala Desa Merbau untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat, pembangunan sudah cukup lengkap dan pada kondisi baik

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Merbau.

Mengenai stuktur organisasi pemerintahan Desa Merbau dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV. 1:
Sruktur Organisasi Pemerintahan Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan



Sumber Data : *Kantor Kepala Desa Merbau 2012*

4.3 Komunikasi Dalam Pembangunan Desa

1. Program Pembangunan Desa

Adapun program-program Pembangunan Desa Merbau yang menjadi rencana atau usulan pada tahun anggaran 2011/2012 adalah sebagai berikut :

- a. Perbaikan Pembangunan Mesjid
- b. Pembangunan Jalan
- c. Pembangunan Jembatan
- d. Pembangunan Sarana Pendidikan

2. Sarana Komunikasi Desa

Untuk menyampaikan informasi-informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan dari program-program pembangunan yang penulis sebutkan diatas. Maka Pemerintahan Desa Merbau menggunakan sarana-sarana komunikasi yang ada di Desa Merbau yaitu sebagai berikut :

1. Mesjid dan Mushollah sebagai tempat ibadah untuk memperkuat tali persaudaraan antara umat islam dengan mengadakan wirid akabar, serata sebagai tempat untuk mencapai pengumuman-pengumuman atau informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan setiap program-program pembangunan terutama pembangunan mesjid.
2. Balai Desa, sebagai tempat untuk musyawarah bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat desa dalam membahas program pembangunan dan sebagai tempat untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman atau informasi-informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan dari setiap program pembangunan.

4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. *Pengetahuan dan keahlian.* Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2. *Pekerjaan masyarakat.* Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktu untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
3. *Tingkat pendidikan dan buta huruf.* Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. *Jenis kelamin.* Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;

5. *Kepercayaan terhadap budaya tertentu.* Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan di Desa Merbau senantiasa tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri tanpa adanya partisipasi masyarakat otomatis pembangunan tidak akan terlaksana, sebagai motivator dalam menyampaikan setiap program-program pembangunan kepada masyarakat baik perencanaan pelaksanaan pembangunan maupun komunikasi didalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan harus di ikut sertakan secara aktif pada pembangunan dan menikmati hasil pembangunan serta melestarikan proses pembangunan itu sendiri secara berkesinambungan. Oleh karena itu proses pembangunan secara alamiah harus muncul dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Sementara pihak pemerintah berperan sebagai pelancar dan pengedali pembangunan mekanisme demikian perlu dipahami bersama oleh segenap komponen pembangunan.

Pada umumnya tidak banyak masyarakat yang menunjukkan perhatian besar terhadap orientasi pembangunan berpartisipasi aktif demi kesempurnaan tujuan pembangunan. Di zaman serba tinggi tingkat pemenuhan tingkat kebutuhan hidup dan kurangnya peluang kerja untuk menghasilkan uang, masyarakat cenderung melakukan partisipasi dengan pertimbangan imbalan berupa materi, meskipun pembangunan tersebut untuk Desa mereka sendiri.

Sebelum penulis membahas partisipasi masyarakat sebagai motivator dan tingkat partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan Desa, dengan partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan Desa, dengan tingkat partisipasi masyarakat terlebih dahulu penulis membahas mengenai karakteristik responden dari beberapa segi yang dapat menunjang hasil analisis yaitu sebagai berikut :

Untuk mengetahui distribusi mata mengetahui distribusi mata pencaharian reponden didalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Klasifikasi Responden Menurut Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Parsentase (%)
1.	Petani	11	12,04 %
2.	PNS	13	14,45 %
3.	Guru	18	21,68 %
4.	Bidan	5	4,81 %
5.	Pedagang	14	15,66 %
6.	Wiraswata	5	6,02 %
7.	Ibu Rumah Tangga	17	20,48 %
8.	Tidak Berkerja	4	4,81 %
	Jumlah	83	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui distibusi mata pencaharian masyarakat Dasa Merbau yang terbanyak adalah sebagai guru yaitu sebesar 21,68 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian petani bagi masyarakat Desa Merbau sangat dominan dengan demikian kurang mendukung proses pelaksanaan dalam program-program pembangunan.

Untuk mengetahui jumlah jenis kelamin responden didalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2 Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	43	51,80 %
2.	Perempuan	40	48,19 %
	Jumlah	83	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2012

Dari tabel 5.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jenis kelamin yang paling dominan adalah laki-laki yaitu 51,80 %. Oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tingkat jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, dengan demikian hal tersebut dengan banyaknya jumlah laki-laki otomatis lancarnya suatu proses pembangunan.

Selanjutnya mengenai distribusi usia responden didalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini ;

Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Menurut Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	17-20 Tahun	24	28,91
2.	21-27 Tahun	28	33,73
3.	28-34 Tahun	10	12,04
4.	35-41 Tahun	15	18,07
5.	49-55 Tahun	6	7,22
	Jumlah	83	100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa distribusi umur responden masyarakat Desa Merbau yang terbanyak pada umur 21-27 Tahun yaitu sebesar 33,73 %, dengan demikian di Desa Merbau ini kurang potensi tenaga sebagai penggerak dalam pembangunan kurang tersedia dengan baik.

5.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

5.2.1 Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan masyarakat desa Merbau pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dari indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan dari keikutsertaan masyarakat dalam rapat yang diadakan oleh desa dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5.4 Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Dalam Rapat Pembangunan Desa

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	9	10,34
2	Cukup Setuju	11	12,64
3	Kurang Setuju	21	24,13
4	Tidak Setuju	46	52,87
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju mengenai keikutsertaan masyarakat dalam rapat pembangunan desa, yaitu sebanyak 46 orang atau 52,87% responden yang menjawab Tidak Setuju, selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Setuju yaitu sebanyak 21 orang atau 24,13% responden dan yang paling sedikit yaitu responden yang menjawab setuju yaitu hanya 9 orang atau 10,43% responden.

Banyaknya responden yang menjawab Tidak Setuju dikarenakan pada saat pelaksanaan rapat pembangunan desa mayoritas dari mereka tidak menghadiri rapat karena kesibukan mereka masing-masing seperti berkerja dan rutinitas masyarakat desa pada umumnya. Keaktifan masyarakat dalam diskusi juga sangat dibutuhkan guna menyaring aspirasi dan masukan-masukan demi terlaksananya pembangunan desa yang maksimal. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keaktifan masyarakat dalam diskusi perencanaan pembangunan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Tanggapan Responden Mengenai Keaktifan Masyarakat Dalam Diskusi Perencanaan Pembangunan Desa

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	10	11,49
2	Cukup Setuju	12	13,80
3	Kurang Setuju	23	26,43
4	Tidak Setuju	42	48,28
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jawaban mayoritas responden adalah Tidak Setuju yaitu sebanyak 42 orang atau 48,28% responden, kemudian diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Setuju yaitu sebanyak 23 orang atau 26,43% responden dan yang paling sedikit adalah responden yang menjawab setuju yaitu hanya sebanyak 10 orang.

Rendahnya keaktifan masyarakat dalam diskusi dikarenakan kurangnya kepercayaan diri dari masyarakat sehingga suasana rapat lebih cenderung terasa kaku dan tidak jarang sulit untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Penyampaian ide-ide yang baik juga di harapkan agar pelaksanaan pembangunan di desa Merbau sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Untuk

melihat tanggapan responden mengenai partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide-ide yang berkaitan dengan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Dala Menyampaikan Ide-Ide Yang Berkaitan Dengan Pembangunan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	8	9,19
2	Cukup Setuju	15	17,24
3	Kurang Setuju	25	28,73
4	Tidak Setuju	39	44,82
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat menjawab Tidak Setuju mengenai partisipasi dalam menyampaikan ide-ide yang berkaitan dengan pembangunan saat rapat yaitu sebanyak 39 orang atau 44,82 % responden, selanjutnya diikuti dengan masyarakat yang menjawab Kurang Setuju yaitu sebanyak 25 orang atau 28,73% responden dan yang paling sedikit yaitu masyarakat yang menjawab Setuju yaitu hanya 8 orang atau 9,19% responden.

Sedikitnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide-ide yang berkaitan dengan pembangunan desa tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya yaitu kurangnya rasa percaya diri masyarakat untuk tampil memberikan masukan-masukan pada forum rapat sehingga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya. Usulan serta saran-saran yang positif tentunya sangat dibutuhkan guna sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan dalam penetapan program pembangunan desa. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai

keikutsertaan dalam memberikan tanggapan dan saran pada usulan yang diajukan oleh peserta rapat lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7 Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan dalam memberikan tanggapan dan saran pada usulan yang diajukan oleh peserta rapat lainnya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	9	10,34
2	Cukup Setuju	13	14,94
3	Kurang Setuju	20	22,99
4	Tidak Setuju	45	51,72
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas responden menjawab Tidak Setuju yaitu sebanyak 45 orang atau 51,72 % responden, selanjutnya diikuti dengan jawaban masyarakat yang menjawab Kurang Setuju yaitu sebanyak 20 orang atau 22,99 % responden dan yang paling sedikit adalah masyarakat yang menjawab Setuju yaitu hanya 9 orang atau 10,34% responden.

Rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam memberikan tanggapan dan saran pada usulan yang diajukan peserta rapat lainnya diduga salah satunya disebabkan masih adanya sikap apatis dari masyarakat terhadap usulan-usulan yang diberikan oleh peserta rapat lainnya.

Tabel 5.8 Tabel Rekapitulai Tanggapan Responden Dari indikator Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

No	Soal	Kategori Jawaban				Jumlah
		S	CS	KS	TS	
1	Keikutsertaan Dalam Rapat Pembangunan Desa	9	11	21	46	87
2	Keaktifan Masyarakat Dalam DiskusiPerencanaanPembangunan Desa	10	12	23	42	87
3	Partisipasi DalamMenyampaikan Ide-Ide Yang Berkaitan Dengan Pembangunan	8	15	25	39	87
4	Keikutsertaan dalam memberikan tanggapan dan saran pada usulan yang diajukan oleh peserta rapat lainnya	9	13	20	45	87
Rata-Rata		9	13	22	43	87
Persentase (%)		10,34	14,94	25,29	49,43	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Keterangan:

S : Setuju
 CS : Cukup Setuju
 KS : Kurang Setuju
 TS : Tidak Setju

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden dari indikator partisipasi dalam Pengambilan Keputusan mayoritas masyarakat memilih jawaban Tidak Setuju yaitu sebanyak 43 orang atau 49,43% responden. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Setuju yaitu sebanyak 22 orang atau 25,29% responden. Adapun jawaban yang paling sedikit adalah responden yang memilih jawaban Setuju yaitu hanya sebanyak 9 orang atau 10,34%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ditandai dengan banyaknya masyarakat yang tidak hadir saat kegiatan rapat penentuan program pembangunan yang di adakan oleh masyarakat desa, hal tersebut juga disampaikan oleh kepala Desa Merbau melalui wawancara peneliti sebagai berikut:

“Ketika pemerintah desa mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan rapat, umumnya hanya sebagian saja dari mereka yang diundang yang hadir di dalam rapat. Tentunya hal ini menyulitkan kami dalam mengambil keputusan, karena apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat maka tentunya akan timbul lagi masalah yang baru” (Wawancara dengan Kepala Desa Merbau Tanggal 11 Desember 2012)

Dari wawancara di atas, secara umum menggambarkan bahwa hanya sedikit masyarakat yang datang saat diundang untuk rapat pembangunan desa, sedangkan keputusan yang diambil harus berdasarkan keputusan bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut berikut wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat desa Merbau:

“Saya Akui memang jarang sekali saya ikut rapat di balai desa baik itu untuk membahas masalah pembangunan maupun masalah-masalah yang lainnya, hal ini dikarenakan saya harus berkerja dari pagi sampai sore hari, saya rasa masyarakat yang lain juga akan beralasan seperti itu.”(Wawancara dengan Bapak Riki Salah seorang masyarakat desa Merbau pada tanggal 11 Desember 2012)

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa alasan masyarakat yang tidak ikut rapat perencanaan / pengambilan keputusan dalam program pembangunan desa dikarenakan kesibukan mereka untuk berkerja yang memakan

waktu dari pagi hingga sore hari, hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menghadiri rapat yang diadakan oleh pihak Pemerintah Desa.

1.2.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program, saat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen & Hoff, meliputi; *pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. Salah satu bentuk partisipasi dalam pelaksanaan adalah dengan keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan keseluruhan program-program pembangunan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa sehingga pelaksanaan pembangunan desa akan mencapai hasil yang maksimal. Untuk mengetahui tanggapan responden dari indikator partisipasi dalam pelaksanaan dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 5.9 Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Keseluruhan Progran Pembnagunan Yang Direncanakan Oleh Desa.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	13	14,94
2	Cukup Setuju	15	17,24
3	Kurang Setuju	37	42,53
4	Tidak Setuju	22	25,29
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat menjawab Kurang Setuju mengenai Keikutsertaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Keseluruhan Progran Pembnagunan Yang Direncanakan Oleh Desa yaitu sebanyak 37 orang atau 42,53 % reponden, selanjutnya diikuti dengan masyarakat yang menjaawab Tidak Setuju yaitu sebanyak 22 orang atau 25,29% responden dan yang paling sedikit yaitu masyarakat yang menjawab Setuju yaitu hanya 13 orang atau 14,94% responden.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan keseluruhan program pembangunan yang direncanakan oleh desa dikarenakan paradigma / pemikiran masyarakat yaitu pembangunan desa adalah tanggungjawab pemerintah desa sepenuhnya, sehingga dalam pelaksanaannya mereka cenderung menganggap bahwa pemerintah desalah yang harus melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut seutuhnya. Partisipasi dalam memberikan sumbangan dana juga akan sangat mempengaruhi guna terwujudnya pelaksanaan pembangunan desa dengan hasil yang memuaskan. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan dana untuk kelancaran program pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10 Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan Dana untuk Kelancaran Program pembangunan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	11	12,64
2	Cukup Setuju	17	19,54
3	Kurang Setuju	29	33,33
4	Tidak Setuju	30	34,48
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat menjawab Tidak Setuju mengenai keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan dana untuk kelancaran program pembangunan yaitu sebanyak 30 orang atau 34,48 % responden, selanjutnya diikuti dengan masyarakat yang menjawab Kurang Setuju yaitu sebanyak 29 orang atau 33,33% responden dan yang paling sedikit yaitu masyarakat yang menjawab Setuju yaitu hanya 11 orang atau 12,64% responden.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan dana untuk kelancaran pembangunan desa dikarenakan mereka beranggapan bahwa untuk pembangunan desa sudah ada anggaran yang disiapkan dari pemerintah dan sama sekali tidak memerlukan sumbangan dari masyarakat lagi. Bentuk sumbangan seperti bahan-bahan mentah (material bangunan) juga akan membantu mengatasi kekurangan-kekurangan yang bisa saja terjadi saat pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan material (bahan-bahan bangunan) untuk kelancaran program pembangunan dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 5.11 Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan Material (Bahan-bahan bangunan) untuk Kelancaran Program Pembangunan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	7	8,06
2	Cukup Setuju	10	11,50
3	Kurang Setuju	31	35,63
4	Tidak Setuju	39	44,88
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat menjawab Tidak Setuju mengenai keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan material (bahan-bahan bangunan) untuk kelancaran program pembangunan yaitu sebanyak 39 orang atau 44,88 % responden, selanjutnya diikuti dengan masyarakat yang menjawab Kurang Setuju yaitu sebanyak 31 orang atau 35,63% responden dan yang paling sedikit yaitu masyarakat yang menjawab Setuju yaitu hanya 7 orang atau 8,06 % responden.

Tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan material (bahan-bahan bangunan) untuk kelancaran program pembangunan dikarenakan anggapan masyarakat bahwa pihak pemerintah desa sudah memiliki anggaran untuk pembangunan desanya yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Untuk mengetahui Rekapitulasi tanggapan masyarakat dari indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.12 Tabel Rekapitulai Tanggapan Responden Dari indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan

No	Soal	Kategori Jawaban				Jumlah
		S	CS	KS	TS	
1	Keikutsertaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Keseluruhan Progran Pembnagunan Yang Direncanakan Oleh Desa	13	15	37	22	87
2	Keikutsertaan Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan Dana untuk Kelancaran Program pembangunan.	11	17	29	30	87
3	Keikutsertaan Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan Material (Bahan-bahan bangunan) untuk Kelancaran Program Pembangunan	7	10	31	39	87
Rata-Rata		10	14	33	30	87
Persentase (%)		11.50	16.10	37.90	34.50	100

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden dari indikator partisipasi dalam Pelaksanaan mayoritas masyarakat memilih jawaban Kurang Setuju yaitu sebanyak 33 orang atau 37,90% responden. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Tidak Setuju yaitu sebanyak 30 orang atau 34,50% responden. Adapun jawaban yang paling sedikit adalah responden yang memilih jawaban Setuju yaitu hanya sebanyak 10 orang atau 11,50%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan masih dalam kategori rendah.

Banyaknya responden yang menjawab kurang setuju dikarenakan asumsi mereka yang menyatakan bahwa semua kegiatan pelaksanaan pembangunan desa

baik dari segi dana, material dan tenaga adalah tanggung jawab pemerintah desa, seperti hasil wawancara peneliti dengan salah seorang warga sebagai berikut :

“Menurut saya, masalah pembangunan desa kan sudah ada di anggarkan oleh pemerintah pusat, jadi tidak perlu adanya sumbangan dana dan bahan-bahan material lagi, selain itu juga harusnya pemerintah desa bisa melaksanakan pembangunan tersebut dengan tidak banyak melibatkan warga, kan sudah ada dana untuk menyewa tukang” (Wawancara dengan Bapak Rezuandri Pada tanggal 12 Desember 2012)

Dari pendapat salah seorang warga tersebut, kemudian peneliti mewawancarai pihak pejabat desa untuk memita tanggapan mengenai pernyataan masyarakat tersebut. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Mananggapi asumsi masyarakat desa tersebut, Memang Pemerintah Pusat juga mengalokasikan dana untuk pembangunan Desa, selain itu juga kita memiliki apa yang disebut APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dari dana tersebutlah kita kelola untuk melakukan pembangunan di desa kita ini. Akan tetapi, masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, selain dengan tujuan bergotong royong, secara tidak langsung akan terjalin silaturahmi yang baik antar sesama warga itu lah yang kita harapkan dari partisipasi masyarakat dalam menunjang program pembangunan yang kita laksanakan sekarang (Wawancara dengan Sekretaris Desa Merbau Tanggal 12 Desember 2012).

Dari berbagai uraian di atas maka dapat kita analisa bahwa masih banyak persepsi atau asumsi masyarakat yang salah dalam menilai siapa yang lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa, dengan demikian hal ini merupakan salah satu penyebab indikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

5.2.3 Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu

program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat dari indikator Partisipasi dalam pengambilan manfaat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13 Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Merasakan Manfaat Atas Pelaksanaan Program Pembangunan Yang Telah Di Tetapkan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	40	45.98
2	Cukup Setuju	15	17.24
3	Kurang Setuju	22	25.29
4	Tidak Setuju	10	11.49
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat menjawab Setuju mengenai masyarakat merasakan manfaat atas pelaksanaan program pembangunan yang telah di tetapkan yaitu sebanyak 40 orang atau 45,98 % reponden, selanjutnya diikuti dengan masyarakat yang menjaawab Kurang Setuju yaitu sebanyak 22 orang atau 25,29% responden dan yang paling sedikit yaitu masyarakat yang menjawab Setuju yaitu hanya 10 orang atau 11,49% responden.

Tingginya jumlah masyarakat yang menjawab setuju tentu saja dikarenakan mereka benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, akan tetapi yang menjadi maslah adalah masih rendahnya keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan pembangunan itu sendiri. Setelah pelaksanaan pembangunan selesai, tentunya hasil pembangunan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selanjutnya masyarakat juga

dapat menilai apakah pelaksanaan program pembangunan tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaksanaan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.14 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Program Sesuai Dengan Target Yang Telah Ditetapkan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	20	22.99
2	Cukup Setuju	47	54.02
3	Kurang Setuju	11	12.64
4	Tidak Setuju	9	10.34
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat menjawab Cukup Setuju mengenai pelaksanaan program sesuai dengan target yang telah ditetapkanyaitu sebanyak 47 orang atau 54,02 % reponden, selanjutnya diikuti dengan masyarakat yang menjaawabSetuju yaitu sebanyak 20 orang atau 22,99% responden dan yang paling sedikit yaitu masyarakat yang menjawab Tidak Setuju yaitu hanya 7 orang atau 8,06 % responden.

Banyaknya masyarakat yang menjawab Cukup Setuju dikarenakan walaupun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program pembangunan yang di Desa Merbau, akan tetapi masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dari pembangunan-pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa merbau itu sendiri. Dengan selsesainya kegiatan pembangunan, maka diharapkan hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dengan cara menggunakan fasilitas yang telah dibangun tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan

responden mengenai keikutsertaan menggunakan Fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.15 Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Menggunakan Fasilitas yang Telah Dibangun Oleh Pemerintah Desa

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	27	31.03
2	Cukup Setuju	35	40.23
3	Kurang Setuju	21	24.14
4	Tidak Setuju	4	4.60
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat menjawab Cukup Setuju mengenai keikutsertaan menggunakan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah desa yaitu sebanyak 35 orang atau 40,23 % responden, selanjutnya diikuti dengan masyarakat yang menjawab Setuju yaitu sebanyak 27 orang atau 31,03% responden dan yang paling sedikit yaitu masyarakat yang menjawab Tidak Setuju yaitu hanya 4 orang atau 4,06 % responden.

Banyaknya responden yang menjawab Cukup Setuju dalam keikutsertaan mereka menggunakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah desa karena walaupun tidak sering menggunakan fasilitas tersebut akan tetapi mereka dapat merasakan manfaat positif dari fasilitas yang dibangun oleh desa tersebut seperti Masjid / Musola, Pos Kamling, Jembatan dan sebagainya. Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden dari indikator Partisipasi dalam Pemanfaatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.16 Tabel Rekapitulai Tanggapan Responden Dari indikator Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

No	Soal	Kategori Jawaban				Jumlah
		S	CS	KS	TS	
1	Masyarakat Merasakan Manfaat Atas Pelaksanaan Program Pembangunan Yang Telah Di Tetapkan	40	15	22	10	87
2	Pelaksanaan Program Sesuai Dengan Target Yang Telah Ditetapkan	20	47	11	9	87
3	Keikutsertaan Menggunakan Fasilitas yang Telah Dibangun Oleh Pemerintah Desa	27	35	21	4	87
Rata-Rata		29	32	18	8	87
Persentase (%)		33,34	36,73	20,73	9,20	100

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden dari indikator partisipasi dalam Pemanfaatan mayoritas masyarakat memilih jawaban Cukup Setuju yaitu sebanyak 32 orang atau 36,73% responden. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Setuju yaitu sebanyak 29 orang atau 33,34% responden. Adapun jawaban yang paling sedikit adalah responden yang memilih jawaban Tidak Setuju yaitu hanya sebanyak 8 orang atau 9,20%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan masih dalam kategori Cukup Tinggi.

Banyaknya responden yang memilih jawaban cukup setuju didasari bahwa pada kenyataannya mereka merasakan manfaat dari fasilitas-fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah desa seperti pembangunan Musola, Jalan, Jembatan dan lain sebagainya. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan akan tetapi secara keseluruhan masyarakat beranggapan bahwa fasilitas-fasilitas yang telah

dibangun bermanfaat bagi mereka seperti pernyataan salah seorang warga sebagai berikut :

“Kami sebagai warga masyarakat sangat bersyukur dan berterimakasih karena dengan pembangunan sarana umum seperti perbaikan jalan, dan Pembangunan Musola ini kami merasakan manfaatnya meskipun kami tidak terlibat secara langsung dalam pembangunannya” (Wawancara dengan Ibu Ramlayulis Salah satu warga desa merbau pada tanggal 12 Desember 2012)

1.2.4 Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai indikator partisipasi dalam Evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17 Tanggapan Responden Mengenai Pembangunan Sudah Mencapai Hasil yang Maksimal

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	8	9,20
2	Cukup Setuju	9	10,34
3	Kurang Setuju	29	33,34
4	Tidak Setuju	41	47,12
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat menjawab Tidak Setuju mengenai pembangunan sudah mencapai hasil yang maksimal yaitu sebanyak 41 orang atau 47,12 % responden, selanjutnya diikuti dengan masyarakat yang menjawab Kurang Setuju yaitu sebanyak 29 orang atau 33,34% responden dan yang paling sedikit yaitu masyarakat yang menjawab Setuju yaitu hanya 8 orang atau 9,20% responden.

Meskipun masyarakat cukup puas dalam pemanfaatan fasilitas umum yang telah dibangun oleh pemerintah desa bersama masyarakat, tetapi dirasakan masih belum mencapai hasil yang maksimal. Berhasilnya sebuah program pembangunan ditandai dengan terlaksananya seluruh rencana yang telah disusun diawal tahap pembangunan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.18 Tanggapan Responden Mengenai Program Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Ditetapkan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	26	29.90
2	Cukup Setuju	35	40.23
3	Kurang Setuju	16	18.40
4	Tidak Setuju	10	11.50
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat menjawab Cukup Setuju mengenai program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 35 orang atau 40,23 % reponden, selanjutnya diikuti dengan masyarakat yang menjaawab Setuju yaitu sebanyak 26 orang atau 29,90 % responden dan yang paling sedikit yaitu masyarakat yang menjawab Tidak Setuju yaitu 10 orang atau 11,50% responden.

Banyaknya responden yang menjawab cukup setuju dikarenakan meskipun hasil dari pelaksanaan pembangunan belum mencapai hasil yang maksimal akan tetapi pembangunan-pembangunan fasilitas tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan maksimal tentunya harus bersih dari segala penyimpangan-

penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat berakibat pada hasil pembangunan. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.19 Tanggapan Responden Mengenai Tidak ada Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	10	11.50
2	Cukup Setuju	15	17.24
3	Kurang Setuju	21	24.14
4	Tidak Setuju	41	47.13
Jumlah		87	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat menjawab Tidak Setuju mengenai tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunanyaitu sebanyak 41 orang atau 47,13 % responden, selanjutnya diikuti dengan masyarakat yang menjawab Kurang Setuju yaitu sebanyak 21 orang atau 24,14 % responden dan yang paling sedikit yaitu masyarakat yang menjawab Setuju yaitu hanya 10 orang atau 11,50 % responden.

Banyaknya responden yang menjawab tidak setuju dikarenakan kurang transparannya pengelolaan anggaran pembangunan oleh pemerintah desa yang kemudian mengindikasikan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut. Untuk mengetahui Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Partisipasi masyarakat dalam Evaluasi dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.20 Tabel Rekapitulai Tanggapan Responden Dari indikator Partisipasi dalam Evaluasi

No	Soal	Kategori Jawaban				Jumlah
		S	CS	KS	TS	
1	Pembangunan Sudah Mencapai Hasil yang Maksimal	8	9	29	41	87
2	Program Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Ditetapkan	26	35	16	10	87
3	Tidak ada Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan	10	15	21	41	87
Rata-Rata		15	20	22	30	87
Persentase (%)		17,24	22,98	25,30	34,48	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden dari indikator partisipasi dalam Evaluasi mayoritas masyarakat memilih jawaban Tidak Setuju yaitu sebanyak 30 orang atau 34,48% responden. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Setuju yaitu sebanyak 22 orang atau 25,30% responden. Adapun jawaban yang paling sedikit adalah responden yang memilih jawaban Setuju yaitu hanya sebanyak 15 orang atau 17,24%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan masih dalam kategori rendah.

Secara umum pelaksanaan pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sudah mencakup semua program yang telah ditetapkan, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi hasil pembangunan masih tergolong minim, umumnya mereka hanya menilai hasil pembangunan secara pribadi dan tidak dalam forum rapat sehingga sulit untuk

mendapatkan kesepakatan dalam penentuan kebijakan dalam mengatasi masalah pembangunan desa tersebut. Berikut tanggapan kepala desa Merbau mengenai hal tersebut.

“Kami Selalu kesulitan dalam mengambil keputusan ataupun tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pembangunan di desa ini, karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat-rapat yang kami adakan. Masyarakat lebih cenderung memiliki penilaian sendiri terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan tidak mengutarakannya di dalam rapat sehingga kita dari pihak pemerintah desa tidak tahu bagaimana penilaian dari masyarakat dan solusi yang harus dilaksanakan” (Wawancara dengan Bapak Sukur selaku Kepala Desa Merbau pada tanggal 14 Desember 2012)

5.3 Pembahasan

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan wawancara dalam penjelasan di atas, maka berikut ini akan di jelaskan pembahasan tentang hasil rekapitulasi dari keseluruhan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Questioner

Angket / Questioner yang telah dibagikan kemudian di klasifikasikan dan dianalisa dalam bentuk tabel-tabel perindikatornya, kemudian dari setiap indikator di analisa dan diolah kedalam bentuk tabel rekapitulasi indikator, setelah keseluruhan indikator di rekapitulasikan maka pembahasan akhir adalah Rekapitulasi Keseluruhan Indikator yang dijadikan tolok ukur dalam penilaian partisipasi masyarakat tersebut. Untuk mengetahui Rekapitulasi Keseluruhan Questioner, dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.21 Rekapitulasi Keseluruhan Questioner.

No	Indikator	Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Jumlah
1	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	9	13	22	43	87
2	Partisipasi dalam Pelaksanaan	10	14	33	30	87
3	Partisipasi dalam Pemanfaatan	29	32	18	8	87
4	Partisipasi dalam Evaluasi	15	20	22	30	87
Jumlah		63	79	95	111	348

Sumber : Data olahan 2012

Keterangan :

F : Frekuensi

% : Persentase

Selanjutnya untuk mengetahui hasil tabulasi dalam menilai jawaban responden pada masing-masing pertanyaan dapat dilakukan dengan cara sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Ari Kunto (2003:43) sebagai berikut ini:

$$(\text{Setuju}) : 4 \times 63 = 252$$

$$(\text{Cukup Setuju}) : 3 \times 79 = 237$$

$$(\text{Kurang Setuju}) : 2 \times 95 = 190$$

$$(\text{Tidak Setuju}) : \frac{1 \times 111 = 111 +}{= \frac{790 \times 100}{1392} = 56,75}$$

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan tingkat partisipasi masyarakat desa merbau terhadap pembangunan dari keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut:

Sesuai	: 76-100 %
Kurang	: 51-75 %
Rendah	: 25-50 %
Sangat Rendah	: 0-25 %

Dari tabel rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan termasuk dalam kategori Kurang ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan 56,75 %. Dikatakan Kurang karena partisipasi masyarakat yang diukur melalui keempat indikator tersebut mayoritas masyarakat tidak turut berpartisipasi, Seharusnya dalam pelaksanaan program pembangunan desa, masyarakat dan pemerintah desa harus saling berkerjasama khususnya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksanakannya pembangunan desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi rendahnya Partisipasi Masyarakat Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan contohnya, masyarakat yang enggan untuk mengikuti kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, dikarenakan masyarakat yang umumnya berkerja di siang hari sehingga tidak dapat ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang di adakan oleh pemerintah desa.
3. Untuk partisipasi dalam pemanfaatan, tidak ditemukan maslah yang *signifikan* karena fasilitas umum yang dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik, dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembangunan fasilitas umum tersebut.
4. Rendahnya partisipas masyarakat dalam evaluasi dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa kegiatan evaluasi terhadap pembangunan yang dilaksanakan adalah mutlak tugas dari pemerintah desa, sehingga masyarakat tidak perlu ikut serta dalam kegiatan evaluasi..

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Partisipasi Dalam pengambilan Keputusan, masih dalam kategori rendah hal ini ditandai dengan sebanyak 43 orang atau 49,43% dari keseluruhan responden menjawab Tidak Setuju, dari pertanyaan-pertanyaan positif yang peneliti berikan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ditandai dengan banyaknya masyarakat yang tidak hadir saat kegiatan rapat penentuan program pembangunan yang diadakan oleh masyarakat desa
2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan, masih dalam kategori rendah hal ini juga ditandai dengan mayoritas jawaban responden menjawab Kurang Setuju, yaitu sebanyak 33 orang atau 37,90% responden. Banyaknya responden yang menjawab kurang setuju dikarenakan asumsi mereka yang menyatakan bahwa semua kegiatan pelaksanaan pembangunan desa baik dari segi dana, material dan tenaga adalah tanggung jawab pemerintah desa.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, masih dalam kategori cukup tinggi, hal ini ditandai dengan mayoritas jawaban responden memilih Cukup Setuju yaitu sebanyak 32 orang atau 36,73% dari keseluruhan responden. Banyaknya responden yang memilih jawaban cukup setuju

didasari bahwa pada kenyataannya mereka merasakan manfaat dari fasilitas-fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah desa seperti pembangunan Musola, Jalan, Jembatan dan lain sebagainya. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan akan tetapi secara keseluruhan masyarakat beranggapan bahwa fasilitas-fasilitas yang telah dibangun bermanfaat bagi mereka

4. Partisipasi dalam evaluasi, masih dalam kategori rendah, hal ini ditandai dengan jawaban responden yang mayoritas menjawab Tidak Setuju yaitu sebanyak 30 orang atau 34,48% dari keseluruhan responden. Secara umum pelaksanaan pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sudah mencakup semua program yang telah ditetapkan, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi hasil pembangunan masih tergolong minim, umumnya mereka hanya menilai hasil pembangunan secara pribadi dan tidak dalam forum rapat sehingga sulit untuk mendapatkan kesepakatan dalam penentuan kebijakan dalam mengatasi masalah pembangunan desa tersebut.
5. Berdasarkan hasil penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Desa Merbau terhadap pembangunan desa, maka peneliti menarik kesimpulan secara umum, setelah masing-masing indikator di jabarkan, selanjutnya setiap hasil rekapitulasi dari masing-masing indikator tersebut digabungkan dan dicari rata-rata serta persentasenya, dan akhirnya didapatkanlah hasil rekapitulasi keseluruhan indikator yang digunakan sebagai pengukur dalam penelitian ini yaitu sebanyak 56,75 % dari keseluruhan indikator,

dimana hasil tersebut masuk kedalam kategori Kurang. Dikatakan kurang karena masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang menyangkut pembahasan maupun pelaksanaan pembangunan di desa Merbau, Kecamatan Bunut Kabupaten pelalawan, seperti; tidak mengikuti kegiatan rapat yang diadakan oleh pemerintah desa, tidak memberikan sumbangan pemikiran / ide-ide untuk pembangunan desa, dan bentuk-bentuk partisipasi langsung maupun tidak langsung lainnya.

6.2 Saran

1. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan komunikasi yang baik epada masyarakat sehingga dapat merluruskan persepsi negartif masyarakat terhadap pemerintah desa mengenai kegiatan pembangunan desa.
2. Memindahkan jadwal rapat pada malam hari sehingga tidak mengganggu aktifitas mayarakat di siang hari.
3. Menciptakan suasana rapat yang lebih bersifat kekeluargaan, sehingga masyarakat tidak canggung untuk memberikan tanggapan, masukan serta ide-ide untuk pembangunan desa.
4. Masyarakat desa juga harus lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan desa khususnya pada pembangunan desa Merbau kecamatan Bunut kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al amin, Muhammad, 2003. *Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Desa Hutan Di Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan*. Pekanbaru UNRI
- Brata Kusuma. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pusataka Utama, 2005.
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Diamar, Son DKK. 2004. *Penggunaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. CV. Cipruy.
- Elmio, Bachrul. 2002. *Keungan Pemerintah Daerah Otonomi Di Indonesia*. Jakarta. UI Press.
- Kartono, Kartini. 2005 *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjoroningrat. 2000. *Metode Penelitian, Masyarakat*. Jakarta. Gramedia.
- Nasution, Zulkarimen. 2002. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta. Grafindo Persada
- Nasikun, 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Ndraha, Talizrta. Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Pembangunan Masyarakat*. 2000. Pembangunan Masyarakat. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nurman, 2003. *Siasat Jurnal Ilmu Spesial Volume 12*. UIR Press
- Puji Astuti, Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Pusataka Pelajar
- Santoso, Purwo, 2003 *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta. Pusataka Pelajar

- Siahaan. N.H.T, 2002 *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta. Erlangga
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- _____,2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung Afabeta.
- Sutarto. 2001. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta. UGM Press
- Uman, Husaini dan Setiady Akbar Pornomo. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta Bumi Aksara.
- Usman, Sunyoto.2010 *Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Widjaja,2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (Menurut PP No. 8 Tahun 2005)*. Jakarta. Persada.
- Wiguna, Imelda. 2000. *Dalam Pengembanagan Usaha Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik (Kekal) Pada PT PLN Pekanbaru Skripsi, UNRI Tidak Diterbitkan*.
- Yulianti, Yoni. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Prpgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok*. Program Pasca Sarjana: Universitas Andalas Padang